

Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Serumpun Jaya Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Ayu Anggraini¹, Viras Alti Pidola²

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Falah Air Molek^{1,2}

ayuanggraini0815@gmail.com¹, virasaltipidola1402@gmail.com²

Diserahkan tanggal 24 Mei 2025 | Diterima 25 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juli 2025

Abstract:

Village-Owned Enterprises (BUMDes) serve as a strategic instrument in rural economic development, aiming to improve community welfare through the management of local potential. However, in practice, many BUMDes have not demonstrated optimal performance due to weak governance, low community participation, and insufficient application of Islamic economic principles as foundational values. This study aims to analyze the effectiveness of the management of BUMDes Jaya Bersama in improving the economy of the Serumpun Jaya village community from an Islamic economic perspective. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of the observation indicate that the effectiveness of BUMDes Jaya Bersama's management falls into the "less optimal" category, with an implementation rate of 57.1%. Interview findings reveal that the management has incorporated principles such as cooperation, participation, emancipation, transparency, accountability, and sustainability. However, the application of Islamic economic principles—such as justice, honesty, transparency, and the avoidance of usury (riba)—has not been fully understood or consistently implemented by all administrators and the community. Factors influencing the effectiveness of BUMDes include community participation, human resource capacity, planning and evaluation systems, and information transparency. The conclusion of this study indicates that although BUMDes Jaya Bersama has made efforts to fulfill its role, improvements in governance and the comprehensive integration of Islamic values are still necessary to promote the village's economic independence.

Keywords: BUMDes, community economy, Islamic economics, management effectiveness.

Abstrak:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrument strategis dalam Pembangunan ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Namun dalam praktiknya, banyak BUMDes yang belum menunjukkan kinerja optimal karena lemahnya tata kelola, partisipasi masyarakat yang rendah, serta kurangnya penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai nilai dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Bersama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Serumpun Jaya ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes Jaya Bersama termasuk dalam kategori **"kurang optimal"** dengan persentase keterlaksanaan 57,1%. Temuan wawancara mengungkap bahwa pengelolaan BUMDes telah mencakup prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, namun penerapan prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghindaran riba belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh pengurus dan masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas BUMDes meliputi partisipasi masyarakat, kapasitas SDM, sistem perencanaan dan evaluasi, serta transparansi informasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BUMDes Jaya Bersama telah berupaya menjalankan perannya, masih diperlukan peningkatan dalam aspek tata kelola dan integrasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.

Kata Kunci: BUMDes, efektivitas pengelolaan, ekonomi masyarakat, ekonomi syariah.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pembentukan BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya pemberdayaan potensi ekonomi lokal serta pengelolaan usaha secara profesional dan berkelanjutan.

BUMDes Jaya Bersama yang didirikan oleh Pemerintah Desa Serumpun Jaya merupakan contoh implementasi dari kebijakan ini. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes masih menghadapi tantangan serius. Beberapa unit usaha mengalami kegagalan, seperti budidaya semangka yang merugi, dan penyertaan modal dari desa terus menurun dari tahun ke tahun. Tingkat efektivitas pengelolaan BUMDes ini dinilai rendah, dengan keterlaksanaan hanya sebesar 57,1% berdasarkan hasil observasi.

Lebih jauh, dalam tinjauan ekonomi syariah, BUMDes seharusnya dikelola dengan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghindaran riba. Prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh pengurus dan masyarakat, yang menyebabkan manfaat BUMDes belum dirasakan secara luas oleh warga Desa Serumpun Jaya.

Kajian Teoretis Efektivitas dalam konteks manajemen didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kurniawan, 2015). Efektivitas pengelolaan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang saling terintegrasi. Dalam pengelolaan BUMDes, efektivitas dapat diukur melalui indikator kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Prinsip dasar ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, keseimbangan, masalah, dan pelarangan riba (Antonio, 2001). Oleh karena itu, setiap pengelolaan usaha termasuk BUMDes seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan BUMDes Jaya Bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta belum terintegrasinya nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik manajerial. Hal ini ditandai dengan, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes, Lemahnya pemahaman pengurus terhadap prinsip ekonomi syariah, Terbatasnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program usaha.

Dalam konteks regulatif (*das sollen*), BUMDes diharapkan menjadi lembaga yang efektif, profesional, dan berbasis syariah, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun dalam realitasnya (*das sein*), efektivitas BUMDes Jaya Bersama masih rendah, dengan beberapa unit usaha yang stagnan dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah di kalangan pengelola dan masyarakat.

Kesenjangan antara idealitas dan realitas ini mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan BUMDes dengan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan etika ekonomi Islam.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Hamril (2021) di Kabupaten Bone, Romaiki Hafni (2021) di Kabupaten Sumenep, dan Siprianus Saiman (2022) di Kabupaten Manggarai Timur. Umumnya penelitian-penelitian tersebut hanya menilai efektivitas dari sisi administratif atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menilai efektivitas pengelolaan BUMDes secara komprehensif, baik dari aspek tata kelola maupun integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Selain itu, fokus penelitian pada BUMDes Jaya Bersama di Desa Serumpun Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, menambah khazanah literatur empiris mengenai praktik BUMDes di wilayah Sumatera, yang relatif masih jarang diteliti.

Tujuan Penelitian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan BUMDes Jaya Bersama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Serumpun Jaya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes, dan untuk menilai sejauh mana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Serumpun Jaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Bersama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Serumpun Jaya berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara holistik dan mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Lokasi penelitian berada di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Desa ini dipilih secara purposive karena memiliki BUMDes yang telah berjalan sejak tahun 2018 dan mengalami dinamika pengelolaan yang kompleks serta relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap aktivitas BUMDes, wawancara mendalam dengan pengurus dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan, struktur organisasi, dan notulen musyawarah desa. Wawancara dilakukan terhadap enam informan kunci yang terdiri dari tiga pengurus inti BUMDes dan tiga orang masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas BUMDes.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator efektivitas pengelolaan BUMDes menurut teori PP-RPDN (Partisipatif, Produktif, Responsif, Demokratis, dan Nondiskriminatif) dan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, amanah, serta larangan terhadap riba dan gharar.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara bersamaan. Peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap praktik pengelolaan BUMDes berbasis nilai-nilai tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes Jaya Bersama masih berada pada kategori "**kurang optimal**". Beberapa unit usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau stagnasi. Faktor seperti perencanaan usaha yang lemah, ketergantungan pada bantuan dana desa, dan rendahnya kapasitas manajerial pengurus menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan. Pengelolaan belum mencerminkan sistem perencanaan dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan BUMDes, dari sisi ekonomi syariah, pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan belum terlihat dalam distribusi manfaat usaha; prinsip kejujuran dan transparansi masih menjadi tantangan dalam laporan keuangan dan pelaporan kegiatan; serta larangan terhadap praktik riba belum disosialisasikan secara luas. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan penyuluhan kepada pengurus dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan, beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes meliputi: pertama, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan usaha; kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengurus BUMDes; ketiga, kurangnya monitoring dan evaluasi berkala; dan keempat, kurangnya dukungan teknologi serta inovasi dalam pengembangan usaha. Keempat faktor ini saling terkait dan perlu ditangani secara menyeluruh untuk mencapai perbaikan.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas BUMDes, untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan, antara lain: meningkatkan kapasitas SDM pengurus melalui pelatihan manajemen dan ekonomi syariah; memperkuat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelibatan aktif dalam perencanaan; menerapkan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang transparan; serta mendorong diversifikasi usaha berbasis potensi lokal dengan pendekatan syariah.

Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan BUMDes Jaya Bersama dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi desa yang profesional, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes Jaya Bersama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Serumpun Jaya masih tergolong kurang optimal, ditandai dengan keterlaksanaan program hanya sebesar 57,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan ideal pendirian BUMDes sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan prinsip ekonomi syariah belum tercapai sepenuhnya. Secara konseptual, BUMDes diharapkan berperan sebagai lembaga sosial dan komersial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal dan tata kelola yang baik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi nyata (*das sein*) di lapangan. Pengelolaan usaha belum berbasis pada perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat masih minim, transparansi laporan keuangan belum berjalan optimal, dan sebagian besar pengurus belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai. Selain itu, nilai-nilai utama

dalam ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghindaran riba belum sepenuhnya menjadi acuan dalam praktik pengelolaan. Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan manajerial dan pemahaman ekonomi syariah bagi pengurus, penyusunan SOP berbasis prinsip syariah, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan evaluasi usaha. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, maka BUMDes berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Hamril. "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Perspektif Ekonomi Syariah*." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021.
- Hafni, Romaiki. "*Efektivitas Pengelolaan BUMDes Sataretanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*." Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2021.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Saiman, Siprianus Brusli. "*Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunung Kecamatan Kota Komba*." Skripsi, STPM Santa Ursula Ende, 2022.
- Zulkarnain. "*Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Islam*." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam* 5, no. 2 (2018): 115–126.